

## **BAB II**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman**

##### **1. Sejarah Kabupaten Sleman**

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijktsblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta Sejarah (sleman.go.id, dilihat 6 Januari 2017).

## **2. Letak Geografis**

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Secara geografis, Kabupaten Sleman berada di bagian utara DIY, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta di bagian selatan, Kabupaten Klaten di bagian timur, Kabupaten Boyolali di bagian utara dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Kulonprogo di bagian barat. Secara astronomis, Kabupaten

Sleman terletak antara  $7^{\circ}.34'-7^{\circ}47'$  lintang selatan dan  $110^{\circ}13' - 110^{\circ}33'$  Bujur Timur. Di bagian utara, terdapat Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Jarak linier Kabupaten Sleman menuju Ibukota Propinsi DIY sekitar 9 Km (sleman.go.id dilihat 06 januari 2017).

**Tabel 2.1**

**Letak Geografis Kabupaten Sleman, 2015**

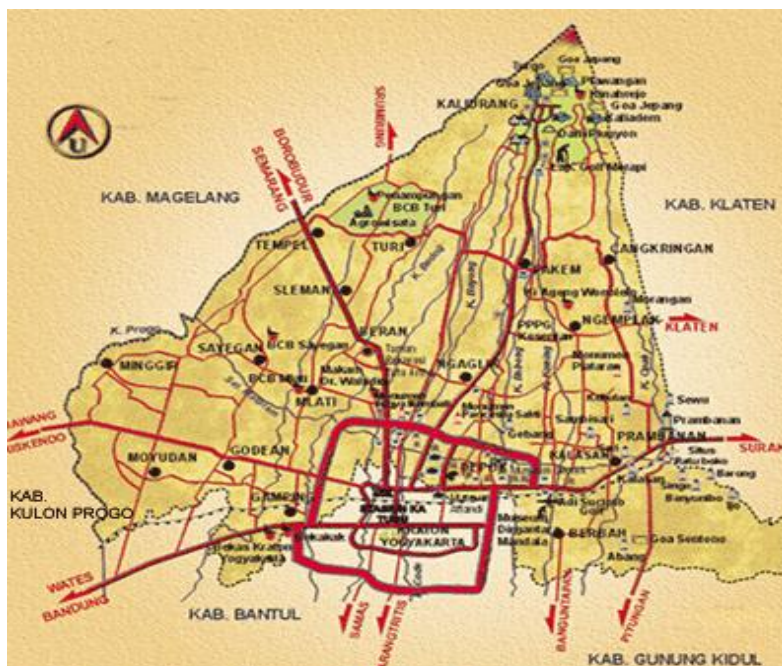
<b>Uraian</b>	<b>Letak Geografis</b>	<b>Batas Wilayah</b>
Utara	$7^{\circ}34'51" LS$	Kab. Boyolali
Timur	$110^{\circ} 13' 00" BT$	Kab. Klaten
Selatan	$7^{\circ} 47' 03 LS$	Kab. Bantul, Kota Yogyakarta
Barat	$110^{\circ} 33' 00" BT$	Kab Kulonprogo, Kab. Magelang

Sumber: sleman.go.id dilihat 06/01/2017

Kabupaten Sleman mempunyai wilayah terluas ketiga setelah Gunungkidul dan Kulonprogo yaitu dengan luas  $574,82 KM^2$ . Luas Kabupaten Sleman sekitar 18,04 persen dari luas seluruh wilayah DIY.

Gambar 2.1

### Peta Wilayah Kabupaten Sleman



Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/peta>

### 3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif,

Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha).Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan).Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa) (sleman.go.id dilihat 06 januari 2017).Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583

6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Banyaknya</b>		<b>Luas (Ha)</b>	<b>Jml Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Kepadatan (Km2)</b>
		<b>Desa</b>	<b>Dusun</b>			
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber: slemankab.go.id dilihat tanggal 06/01/2017

#### 4. Pemerintahan

Peraturan daerah nomor 12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998 menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 sebagai hari jadi Sleman. Yang dimaksud hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Secara administrasi, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat, sedangkan jumlah desa sebanyak 86 dan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa. Dari 86 desa, 59 desa (68 persen) dikategorikan sebagai daerah perkotaan, sedangkan 27 desa termasuk perdesaan.

Desa dikategorikan perkotaan jika mempunyai akses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dan sebagian besar penduduk bukan masyarakat pertanian. Desa dibagi menjadi beberapa pedukuhan yang terdiri dari beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Di Kabupaten Sleman terdapat 1.212 pedukuhan, 2.933 RW, 7.364 RT.

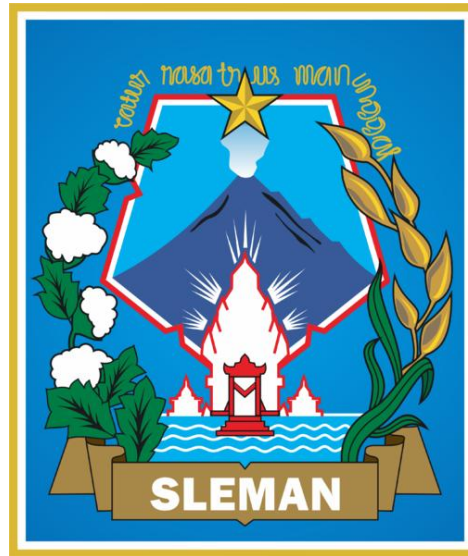
**Tabel 2.3**  
**Statistik Pemerintahan Kabupaten Sleman**

<b>Jumlah Wilayah Administrasi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kecamatan	17	17	17
Desa:	86	86	86
1. Perkotaan	59	59	59
2. Perdesaan	27	27	27

Sumber: sleman.go.id dilihat 06/01/2017

Sebagai lambang identitas, simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sarat dengan makna. Berikut ini dipaparkan makna yang dikandung simbol tersebut. Pada pandangan sekilas, lambang yang berbentuk segi empat melambangkan prasaja dan kekuasaan.

**Gambar 2.2**  
**Lambang Kabupaten Sleman**



Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/lambang-daerah>

Dasar logo adalah *pertama*, Pancasila; *kedua*, Kekayaan Alam; *ketiga*, Kebudayaan. Selanjutnya yaitu maksud dari warna, 1) Kuning yang berarti Keluhuran, 2) Kuning Keemasan yang berarti Keemasan/Kejayaan, 3) Merah yang berarti Keberanian, 4) Putih yang berarti Kesucian, 5) Biru Tua yang berarti Kesetiaan, 6) Hijau yang berarti Kemakmuran, 7) Biru Muda yang berarti Cita-cita, dan 8) Hitam yang berarti Keabadian.

Makna dari Lukisan Simbol Kabupaten Sleman memiliki makna berikut ini:



1. Bintang sudut lima dengan warna kuning emas di atasnya, merupakan Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pancasila.
2. Perisai bentuk segi lima, adalah lambang persatuan dan kesatuan sebagai dasar untuk menyempurnakan masyarakat.
3. Gunung Merapi, melambangkan kemegahan daerah kabupaten Sleman dan berdiri tegak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila.
4. Candi Prambanan, melambangkan tingginya kebudayaan daerah Kabupaten Sleman, yang mengandung arti gotong-royong dalam menuju kejayaan.
5. Sinar dengan jari-jari masing-masing lima, menggambarkan kecemerlangan bagi daerah Sleman sepanjang masa.
6. Tiga gelombang menggambarkan tiga sungai, yang melambangkan kemakmuran dalam mempertinggi pangan dan sandang di daerah Kabupaten Sleman. Kali Krasak, mengalir di sebelah barat laut, Kali Kuning di bagian tengah dan Kali Opak di sebelah timur daerah Kabupaten Sleman
7. Lukisan batang padi dan kapas, di samping melambangkan pangan dan sandang, juga melukiskan tanggal dan tahun pindahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari ibukota darurat di Ambarrukmo ke Beran. Empat buah kapas

melambangkan tanggal empat, tujuh buah bulir padi melambangkan bulan tujuh, enam daun kapas dan empat lembar daun padi melambangkan tahun 64, dengan *suryo sengkolo: catur rasa trus manunggal* (1964).

8. Semua yang berbentuk dan berbilangan lima melambangkan Pancasila. Kata Sleman, ditulis di atas warna kuning emas, melambangkan keagungan dan keemasan bagi daerah Kabupaten Sleman.

Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman adalah seorang Bupati yang bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dibantu oleh Sekretariat Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor-Kantor. Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten, yaitu:

1. Asisten Bidang Pemerintahan
2. Asisten Bidang Pembangunan
3. Asisten Bidang Administrasi

Sejak dikeluarkan moratorium PNS pada tahun 2011 mengenai penghentian sementara penerimaan PNS baru, jumlah PNS di Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang jumlah mencapai 2,38 persen dibanding

tahun 2014. Disamping adanya moratorium, penurunan jumlah dikarenakan beberapa PNS yang memasuki masa purnabakti. Dilihat dari jenjang yang ditamatkan, penurunan jumlah tertinggi terjadi pada PNS dengan pendidikan DI-DIII.

**Tabel 2.4**

**Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin di Kab. Sleman 2013-2015**

Jenis Kelamin	TAHUN		
	2013	2014	2015
Laki-laki	5.257	5.219	5.049
Perempuan	6.775	6.211	6.792
Jumlah	12.032	12.130	11.841

Sumber: sleman.go.id dilihat 06/01/2017

**Tabel 2.5**

**Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kab. Sleman**

Jenis Pendidikan	TAHUN		
	2013	2014	2015
SD	95	92	90
SMP	232	241	235
SMA	2486	2424	2381
DI-DIII	2507	2342	2189
DIV-S2	6712	7031	6946
Jumlah	12.032	12.130	11.841

Sumber: sleman.go.id dilihat 06/01/2017

## **B. Profil Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman**

### **1. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman**

Terbitnya Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Kabupaten dapat membentuk lembaga daerah sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah masing-masing. Tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2000 tentang organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan evaluasi organisasi perangkat daerah. Maka terbitlah Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2000. Salah satu hasil evaluasi organisasi perangkat daerah yang dipandang perlu dilakukan perubahan adalah kantor Badan Kepegawaian Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. Pada 2004 dengan terbitnya Undang-Undang nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kelembagaan, maka terbitlah Peraturan daerah nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah.dengan ditetapkannya peraturan

daerah tersebut maka disusunnya peraturan bupati yang mengatur uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing organisasi.

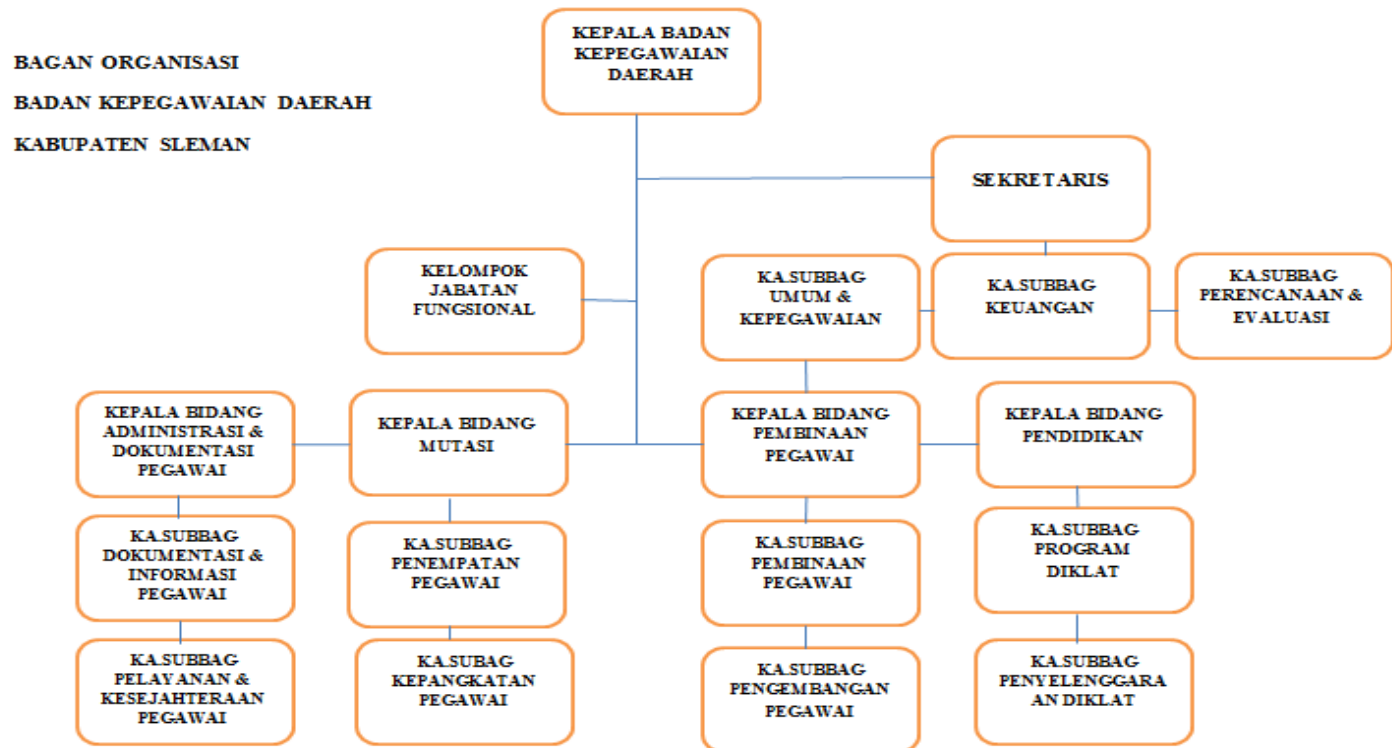
Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diatur dengan peraturan Bupati No 52 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati no 38 tahun 2009 kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor Kepegawaian Daerah adalah :

- 1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsure penunjang Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah.

## 2. Struktur Organisasi

Gambar 2.3

### Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sleman



Sumber : <http://bkd.slemankab.go.id/profil/struktur.html> dilihat 06/01/2017

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 52 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai terdiri dari:
  1. Sub Bidang Dokumen dan Informasi Pegawai
  2. Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:
  1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
  2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
- e. Bidang Mutasi terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penempatan Pegawai.
  2. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  1. Sub Bidang Program pendidikan dan Pelatihan.
  2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sleman**

#### **a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyelenggaraan urusan umum;
4. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5. penyelenggaraan urusan keuangan;
6. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

#### **b. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai**

Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai, serta pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.



Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai;
2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai, serta pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
3. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai;
4. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai.

**c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :**

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan pegawai.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;

2. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pegawai;
3. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
4. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengembangan pegawai; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.

**d. Bidang Mutasi**

Bidang Mutasi mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai. Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;
2. perumusan kebijakan teknis penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai;
3. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penempatan pegawai;
4. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan pegawai

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Mutasi.

**e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan;
3. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penyusunan program pendidikan dan pelatihan;
4. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pendidikan dan pelatihan; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

**4. Visi dan Misi badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman**

Visi :

**"Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional"**

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pembinaan, & pengembangan pegawai
3. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas

Untuk mewujudkan misi badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, maka perlu penjabaran kembali tentang tujuan dan sasaran yang operasional. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai. Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara specific dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sarannya.

1. Terwujudnya Sumber daya manusia aparatur yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
  - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai.
  - Meningkatnya kualitas perencanaan diklat pegawai
2. Terwujudnya pola perencanaan dan pengembangan karier pegawai
  - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
  - Meningkatnya implementasi sistem penghargaan dan hukuman pegawai.

4. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas
  - Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang akurat dan efisien.